

Determinan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi

Hasan Basri*, Andri Devita, Ali Fahmi, Juanda Uly Siregar

Universitas Muhammadiyah Jambi

*Correspondence: hasan.stiemjbi@gmail.com, jurnal@umjambi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kemampuan keuangan daerah serta strategi peningkatannya di Provinsi Jambi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) determinan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi dimana variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan dana perimbangan yang tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemampuan keuangan daerah. Sedangkan sisanya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemampuan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi; dan (2) strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi berada adalah strategi diversifikasi yang memfokuskan dalam pemanfaatan peluang jangka panjang yang dimiliki Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Investasi Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Analisis SWOT

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the determinants of regional financial capacity and strategies for improving it in Jambi Province. This research is included in the quantitative descriptive research category. The analytical tools used in the research are multiple linear regression and SWOT analysis. The results of this research conclude that: (1) the determinants of the regional financial capacity of Jambi Province where the variables of economic growth, investment and balancing funds do not have a significant and negative effect on regional financial capacity. Meanwhile, the remaining economic growth has a significant effect on decreasing regional financial capacity and regional original income and population have a significant positive effect on increasing regional financial capacity in Jambi Province; and (2) the strategy to improve the financial capacity of the region where Jambi Province is located is a diversification strategy that focuses on exploiting the long-term opportunities that Jambi Province has.

Keywords: Regional Financial Capability, Economic Growth, Regional Original Income, Regional Investment, Population, Balancing Fund, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

Kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan dalam daerahnya, khususnya yang bersumber dari pendapatan awal daerahnya, disebut dengan kapasitas keuangan daerah. Pemerintah daerah selama ini sangat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sektornya. Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan PAD guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sumber-sumber PAD yang ada atau dengan menelusuri sumber-sumber PAD baru sesuai dengan peraturan yang ada serta mempertimbangkan potensi dan keadaan perekonomian masyarakat (Halim, 2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah terkait dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pengelolaan potensi daerah (Prastiwi dkk, 2016).

Arisandi dkk (2012) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola yang baik. Tujuan pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana pengambil kebijakan sektor publik di pemerintah daerah memenuhi tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat. Estimasi eksekusi dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. pertama, untuk membantu meningkatkan

efisiensi pemerintah. Kedua, membagi aset dan memutuskan secara sederhana. Ketiga, meningkatkan komunikasi kelembagaan dan mewujudkan akuntabilitas publik. Namun mayoritas daerah menghadapi permasalahan yang sama dalam melaksanakan otonomi daerah: kontribusi PAD terhadap APBD yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, masih jauh lebih besar dibandingkan kontribusi dana perimbangan. (Adi, 2006).

Untuk membiayai program pembangunan diperlukan dana untuk melaksanakan otonomi daerah dan percepatan pembangunan daerah. PAD diharapkan mampu menyumbang minimal 30% pendapatan daerah di Provinsi Jambi. Pada kategori cukup, rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 39,44% pada tahun 2017 hingga 2023. Tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal khususnya pemerintah pusat dan provinsi akan semakin rendah ketika rasio kemandirian semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai pembentukan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menciptakan lapangan kerja baru, maka perlu bagi pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal ini akan menciptakan kemandirian daerah dalam sistem otonomi yang diterapkan di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kemampuan keuangan daerah serta strategi peningkatannya di Provinsi Jambi

Tinjauan Pustaka

Potensi Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah yang disinergikan dengan pencapaian kemandirian daerah, maka dapat digali potensi keuangan daerah sebagai langkah menuju kemandirian daerah. Rumus penentuan tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: (Mondes, 2017)

$$PPKD = \frac{RPD + RRD + RLaba BUMD + RLain-Lain PDYS + RDBH}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dimana: PPKD = Potensi Kemampuan Keuangan Daerah; RPD = Realisasi Pajak Daerah; RRD = Realisasi Retribusi Daerah; RLaba BUMD = Realisasi Laba Badan Usaha Milik Daerah; RLain-Lain PDYS = Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan RDBH = Realisasi Dana Bagi Hasil

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Tangkilisan (2007) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas keuangan daerah, yaitu: (1) Potensi perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur potensi perekonomian daerah yang banyak digunakan; dan (2) Batasan Administrasi Pendapatan Daerah, mengandung makna bahwa kebebasan moneter provinsi dapat diperluas secara terencana melalui kapasitas atau pelaksanaan yayasan atau kantor kreatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai Gaji Unik Teritorial dan Aset Penyesuaian (Devita dkk, 2014).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai keseluruhan dari berbagai kegiatan ekonomi penduduk merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang baik dapat ditetapkan dengan memberikan prioritas pada sektor-sektor yang dianggap perlu dan dapat menjadi sektor andalan, serta menentukan apakah sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber perekonomian di daerah asal. Identifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah berarti menyelidiki dan menentukan mana yang sebenarnya merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan memaksimalkan hasilnya dengan cara menyelidiki, membina, dan mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut dengan baik. Kendala utama pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, kecilnya proporsi pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah membuat pemerintah daerah kurang mempunyai kebebasan dalam

mengelola keuangan daerah. Belanja sehari-hari dan pembangunan sebagian besar dipenuhi dari dana kompensasi, khususnya dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah adalah dengan mengambil keuntungan dari pendapatan asli daerah (Pratiwi, 2007).

3. Investasi Daerah

Investasi adalah sebuah konsep di mana suatu jumlah dihitung selama periode waktu tertentu. Namun investasi mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia pada suatu periode tertentu. Penambahan persediaan barang modal tersebut sesuai dengan belanja modal periode sebelumnya. Jelasnya investasi juga merupakan salah satu komponen PDB, dengan rumus $PDB = C + I + G + (X - M)$. Fungsi investasi pada aspek ini terbagi menjadi investasi non residensial (pabrik, mesin, dll) dan investasi residensial (rumah yang baru dibangun). Investasi merupakan fungsi pendapatan dan tingkat suku bunga relatif terhadap $I = f(Y, i)$. Pendapatan yang lebih tinggi mendorong lebih banyak investasi, namun tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengurangi bunga yang diperoleh dari investasi karena investasi tersebut lebih mahal daripada pinjaman. Bahkan jika perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga mewakili biaya peluang untuk menginvestasikan uang tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yaitu Penanaman modal dari luar negeri.

4. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan komponen penting dalam aktivitas moneter dan dalam mendorong perekonomian suatu negara. Di negara-negara non-industri, permasalahan kependudukan dan bisnis selalu menjadi perhatian. Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan merupakan hal yang sangat mendesak dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang besar menambah rumitnya permasalahan perbaikan. Dapat juga dikatakan bahwa permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang paling sulit untuk dihadapi dan dipertahankan. Pakar keuangan dan pakar kependudukan telah lama memahami bahwa mengurangi laju pertumbuhan penduduk di negara-negara agraris merupakan rencana penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan moneter (BPS, 2014).

5. Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah. Berapa Besarnya Aset Penyesuaian yang diselesaikan setiap tahun anggaran dalam APBN. Penyesuaian Aset disebut juga perpindahan atau penghargaan. Ketimpangan finansial dan ekonomi di kawasan menjadi penyebab terjadinya pembayaran transfer. Selain itu, transfer tersebut bertujuan untuk menstabilkan kegiatan perekonomian di daerah, mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mempersempit kesenjangan vertikal antara Pusat dan Daerah, serta mengatasi permasalahan dampak pelayanan publik.

Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Alat strategis yang disebut analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau entitas dalam upaya meningkatkan keuangan daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Analisis SWOT dalam rangka perbaikan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. *Stength* (Kekuatan)

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Stabil: pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan.
- 2) Sumber Daya Alam dan Pariwisata
- 3) Infrastruktur yang Memadai
- 4) Dukungan Kebijakan Pemerintah

2. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) Batasan SDM yang dibatasi
- 2) Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan
- 4) Rendahnya Efisiensi dan Transparansi:

3. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Tren pariwisata lokal dan pertumbuhan ekonomi kreatif berpotensi memberikan sumber pendapatan baru.

- 2) Penanaman modal lokal dan asing;
- 3) Digitalisasi dan Pengembangan Mekanik
- 4) Partisipasi Antar Daerah.
4. *Threats* (Ancaman)
 - 1) Kerentanan Moneter di Seluruh Dunia
 - 2) Perubahan Pengaturan Pemerintah
 - 3) Peristiwa bencana
 - 4) Persaingan Antar Daerah

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi, data total investasi Daerah Provinsi Jambi; Data Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan; .Data jumlah penduduk Provinsi Jambi; dan data dana perimbangan Provinsi Jambi.

Perkembangan kinerja kemampuan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\Sigma(RK+RE+RBL+RBTL+RPB)}{n}$$

Keterangan: KKD = kemampuan keuangan daerah; RK = rasio kemandirian; RE = rasio efektifitas; RBL = rasio belanja langsung; RBTL = rasio belanja tidak langsung; RPB = rasio pengelolaan belanja; Σ = penjumlahan dari RK, RE, RBL, RBTL dan RPB; n = jumlah rasio keuangan

Kemudian, menentukan keuangan Provinsi Jambi periode tahun 2010-2023 dengan menggunakan analisis regresi semi logistik dan analisis regresi linier, Dimana dalam penelitian ini yaitu PE, PAD, INV, JP dan DP sebagai variabel bebas (variabel bebas), akan dianalisis pengaruhnya terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD) sebagai variabel bawahan (variabel terikat) dengan resep sebagai berikut: (Sugiyono, 2019)

$$KKD = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 \text{LogPAD} + \beta_3 \text{LogINV} + \beta_4 \text{LogJP} + \beta_5 \text{LogDP} + e$$

Keterangan: KKD = Kemampuan Keuangan Daerah (melalui rasio kinerja keuangan dalam persentase); PE = Pertumbuhan Ekonomi (persen); PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah); INV = Investasi Daerah (PMDN + PMA) (juta rupiah); JP = Jumlah Penduduk (Jiwa); DP = Dana Perimbangan (Juta Rupiah); Log = Logaritma; β_0 = Konstanta; β_{1-5} = koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas; e = standar error; t = waktu

Analisis strategi peningkatan kualitas hidup di Provinsi Jambi, dilakukan analisis SWOT dengan menggunakan 15 respon, 9 diantaranya adalah pendidik, 6 diantaranya adalah praktisi, dan 1 diantaranya merupakan anggota DPDR Provinsi Jambi. Tujuh penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) untuk mengetahui tingkat pendidikan dan lapangan kerja di provinsi tersebut.

Tabel 1
Matrik Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor-Faktor Internal	Bobot
Kekuatan	
1. SDM untuk peningkatan PAD	0,14
2. Pembagian tugas jelas	0,14
3. Perda yang mendukung	0,15
4. Sarana dan prasarana yang mendukung	0,14
5. Kerja Hubungan that is useful	0,14
6. Dukungan anggaran yang berupa pemberian insentif	0,14
Pengawasan dari pemerintah terhadap pengolahan PAD	0,14
Total	1,00

Faktor-Faktor Internal	Bobot
Kelemahan	
1. Kekurangan tenaga operasional untuk peningkatan PAD	0,15
2. Belum optimal koordinasi pemerintah terkait	0,14
3. Tidak ada sanksi yang diberikan	0,14
4. Belum optimal terhadap wajib pajak	0,14
5. Memiliki potensi daerah terbatas	0,15
6. Rotasi pengelola PAD terlalu cepat	0,14
7. Pengelolaan keuangan daerah rendah	0,14
Total	1,00

Sumber: data olahan

Tabel 2
Matrik External Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor-Faktor Eksternal	Bobot
Peluang	
1. Adanya kesempatan mengikuti diklat	0,15
2. Tempat dan objek yang strategis	0,15
3. Adanya Sarana dan prasarana yang modern	0,17
4. Kesadaran membayar pajak dari masyarakat	0,13
5. Adanya potensi pajak yang belum tergali	0,12
6. Teknologi informasi yang makin moderen	0,15
7. Adanya pertambahan jumlah pendudukan	0,12
Total	1,00
Ancaman	
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat	0,14
2. Instabilitas Keamanan rendah	0,14
3. Wajib pajak yang keberatan atas penetapan pajak	0,14
4. Manajemen pengusaha yang kurang baik	0,14
5. Terjadinya KKN	0,14
6. Wajib pajak yang menghindari untuk membayar pajak	0,15
7. Politik dan ekonomi kurang stabil	0,14
Total	1,00

Sumber: data olahan

HASIL

Tabel 3
Variabel dan Prioritas Kebijakan

No	Variabel Prioritas	Nilai Prob.	Keterangan	Prioritas Kebijakan
1	Jumlah Penduduk (JP)	0,0027	Signifikan	I
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,0385	Signifikan	II

Sumber: data olahan

Tabel 3 menyajikan dua prioritas kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi agar pengembangan kemampuan keuangan daerah lebih cepat ditumbuhkembangkan. Agar kebijakan tersebut lebih fokus dan terarah maka, prioritas kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Jambi harus pula menggunakan program yang lebih terarah. Program tersebut merupakan program pemerintahan Provinsi yang berbasis pada prioritas kebijakan penumbuh kembangkan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Jambi.

Tabel 4
Instrumen Kebijakan dan Program Utama

No	Prioritas Kebijakan	Instrument Kebijakan	Program Utama
1	I	Peningkatan Jumlah Penduduk	1. Meningkatkan jumlah dan mutu penduduk yang produktif 2. Membangun kesadaran penduduk agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah pada kawasan cepat tumbuh
2	II	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah

Sumber: data olahan

Tabel 4 diketahui bahwa program utama merupakan jabaran dari instrument kebijakan yang menjadi prioritas dalam pengembangan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi. Ada tiga instrument kebijakan yang menjadi fokus dan diprioritaskan yaitu: 1) peningkatan jumlah penduduk; dan 2) peningkatan pendapatan asli daerah

Tabel. 5
Hasil Estimasi Model Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	216.7183	36.67943	5.908442	0.0004
PE	0.599995	0.433709	1.383403	0.2039
PAD	1.30E-05	5.25E-06	2.473240	0.0385
INV	-1.03E-13	6.52E-13	-0.157923	0.8784
JP	5.10E-05	1.19E-05	4.271683	0.0027
DP	4.18E-06	2.80E-06	1.494573	0.1734
R-squared	0.858635	Mean dependent var		71.35601
Adjusted R-squared	0.770281	S.D. dependent var		4.331213
S.E. of regression	2.075906	Akaike info criterion		4.596199
Sum squared resid	34.47507	Schwarz criterion		4.870081
Log likelihood	-26.17339	Hannan-Quinn criter.		4.570846
F-statistic	9.718196	Durbin-Watson stat		2.632682
Prob(F-statistic)	0.003011			

Sumber: data olahan

Tabel 5 dapat dibuatkan persamaan model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KKDt = 216,7183 + 0,59995PEt + 1,30E-05PADt - 1,03E-13INVt + 5,10E-05JPt + 4,18E-06DPt + et$$

Secara umum nilai koefisien β_0 adalah sebesar 216,7183, artinya selama tahun 2010 hingga tahun 2023 tidak terjadi penyesuaian faktor Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi (INV), Jumlah Penduduk (JP) dan Dana Perimbangan (DP) Wilayah Jambi tidak mengalami perubahan atau menerima secara konsisten, Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Wilayah Jambi akan mengalami kenaikan sebesar 216,7183 persen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, tidak hanya variabel dalam penelitian ini saja, dikarenakan $R^2 = 0,858635$ atau 0,141365 tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar situasi ini.

Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalani otonomi daerah karena kemampuan keuangan dalam menjalani pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah yang tinggi dinilai tidak efektif dan belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ke depan, pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi tersebut agar dapat segera mengambil kebijakan yang tepat dan efektif serta kemampuan keuangan daerah dapat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Semua variabel independen yang berpengaruh terhadap kapasitas keuangan daerah (KKD) Provinsi Jambi, penurunan kapasitas keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi (PE), investasi (INV), maupun dana perimbangan (DP). Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dan jumlah penduduk (JP) berdampak pada perluasan batas moneter provinsi di Wilayah Jambi.

Tabel 6
Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No.	Faktor-Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai (Bobot x Rating)
A.	Kekuatan (<i>Strength</i>)			
1.	Personal harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola PAD	3,30	0,14	0,47
2.	Tugas untuk petugas pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersesuaian	3,30	0,14	0,47
3.	Adanya Perda yang mengatur PAD di Provinsi Jambi	3,40	0,15	0,50
4.	Memiliki Instrumen penunjang	3,20	0,14	0,45
5.	Keterkaitan antara beberapa instansi dalam penerimaan PAD	3,30	0,14	0,47
6.	Alokasi dana yang berupa pemberian intensif pada petugas pemungutan tersedia	3,20	0,14	0,45
7.	Pengawasan yang dilakukan pemda terhadap pengelolaan PAD	3,30	0,14	0,47
	Total Kekuatan	23,00	1,00	3,29
B.	Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
1.	Tenaga operasional dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum terpenuhi	3,20	0,15	0,48
2.	Koordinasi antara seksi dan instansi pemerintah terkait belum maksimal	3,10	0,14	0,45
3.	Pemda belum mampu dalam menetapkan sanksi administrasi	3,00	0,14	0,42
4.	Perhatian terhadap wajib pajak/retribusi rendah	3,00	0,14	0,42
5.	Masih terbatasnya penerimaan PAD	3,30	0,15	0,51
6.	Perputaran/perpindahan (<i>turn over</i>) pegawai pengelola PAD terlalu cepat	2,90	0,14	0,39
7.	Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	2,90	0,14	0,39
	Total Kelemahan	21,40	1,00	3,06
	Selisih Kekuatan-Kelemahan			0,22

Sumber: data olahan

Tabel 6 menjelaskan Provinsi Jambi memperoleh skor kekuatan total sebesar 3,29 dan skor kelemahan total sebesar 3,06. 0,22 memisahkan total kekuatan dari total kelemahan. Sedangkan Tabel 7 hasil analisis swot terhadap faktor eksternal, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dapat dilihat pada tabel 8 diperoleh total rating skor peluang yang dimiliki Provinsi Jambi adalah 2,87 dan total rating skor ancaman sebesar 3,06. selisih antara peluang dengan ancaman yaitu -0,19.

Tabel 7
Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

No.	Faktor-Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai (Bobot x Rating)
A.	Peluang (<i>Opportunity</i>)			
1.	Adanya Diklat pengelola penerimaan PAD	3,00	0,15	0,45
2.	Lokasi dan objek pajak potensial	2,60	0,13	0,34
3.	Moderenisasi instumen peningkatan PAD	3,00	0,15	0,45
4.	Kesadaran objek pajak dalam memenuhi kewajiban	3,40	0,17	0,58
5.	Masih adanya objek pajak/retribusi yang belum tergali	2,40	0,12	0,29
6.	Informasi semakin akurat	3,00	0,15	0,45
7.	Jumlah penduduk yang potensial	2,40	0,12	0,29
	Total Peluang	19,80	1,00	2,87
B.	Ancaman (<i>Threat</i>)			
1.	Kurangnya kepercayaan dari masyarakat	2,90	0,14	0,39
2.	Instabilitas keamanan	3,00	0,14	0,42
3.	Keberatan dalam penetapan pajak/retribusi	3,00	0,14	0,42
4.	Adanya pengusaha yang kurang baik	3,10	0,14	0,45
5.	Praktek KKN yang masih ada	3,20	0,15	0,48
6.	Adanya wajib pajak/retribusi yang menghindari membayar pajak/retribusi	3,10	0,14	0,45
7.	Politik dan ekonomi tidak stabil	3,10	0,14	0,45
	Total Ancaman	21,40	1,00	3,06
	Selisih Peluang-Ancaman			-0,19

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) determinan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi dimana variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan dana perimbangan yang tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemampuan keuangan daerah. Sedangkan sisanya

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemampuan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi. Dengan besar nilai R-squared (R^2) 0,858635 atau sekitar 85,86 persen; dan (2) strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi berada adalah strategi diversifikasi yang memfokuskan dalam pemanfaatan peluang jangka panjang yang dimiliki Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, M., Darmanto, Priangkoso, T., 2012. Analisa Pengaruh Bahan Dasar Pelumas Terhadap Viskositas Pelumas dan Konsumsi Bahan Bakar. *Jurnal Momentum UnwahaS*, 8(1). 56-61
- Adi, Priyo Hari, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006*, 1-22
- Devita, A., Delis, A., Junaidi, 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70
- Halim, A., 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Saerah)*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mondes, M., 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 101–118.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., Chomsatu, Y., 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*. 872-879
- Pratiwi, Novi., 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia, *Tesis*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo